

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa pemerintahan orde baru, pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara sentralistik, yang meletakkan pemerintah pusat sebagai pemrakarsa, perencana, dan pelaksana tunggal pada pembangunan Negara. Daerah tidak dijadikan sebagai pelaku pembangunan, melainkan sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan jalan Saat ini belum maksimal karena belum adanya proses perencanaan melalui upaya yang dilakukan secara terencana, Salah satu yang menghambat perekonomian saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan setapak atau pengerasan) Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara sentralistik, yang meletakkan pemerintah pusat sebagai pemrakarsa, perencana, dan pelaksana tunggal pada pembangunan. Daerah tidak dijadikan sebagai objek pelaku pembangunan, melainkan sebagai objek dari pada pembangunan itu. Pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang sebagaimana dijelaskan dalam UU. No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat perlu adanya kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah

kabupaten dan kota dalam memberikan sentimen positif kepada penanpungan aspirasi-aspirasi masyarakat lokal. pemerintah daerah memberikan kewenngan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yang menuntut adanya ruang terbuka bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Indonesia sebaagai negara yang demokratis melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif yang dimana masyarakat semakin dituntut oleh globalisasi yang begitu cepat untuk merubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi (UU No.32 Tahun 2004)

Sekalipun daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerahnya sendiri, namun konsep pembangunan daerah harus tetap berada pada lingkup pembangunan nasional yang merupakan akumulasi dari prmbangunan daerah. Oleh karna itu, pembangunan harus mencakup seluruh wilayah yang berada didesa tersebut. Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan pemerintah daerah dan swasta. Maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, karna merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayah

Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. akan tetapi, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih timbul hal hal yang dapat

menghambat proses pembangunan. Hambatan hambatan tersebut harus benar benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan telah mengalami beberapa pergeseran dalam hal mekanisme, struktur dan prosesnya. Hal ini ditandai dengan UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menginstruksikan setiap daerah wajib untuk menyusun dokumen perencanaannya yang baru dalam hal keterkaitan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerahnya.

Perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dalam mempertahankan kesatuan. Untuk melihat hal ini perlu diperhatikan mekanisme, struktur dan proses yang dijadikan acuan dasar dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional serta bagaimana kaitannya. Dalam pengertiannya perencanaan pembangunan nasional adalah upaya untuk menyiapkan dan mengarahkan secara sistematis kegiatan kegiatan penyelenggara pembangunan secara nasional yang meliputi usaha mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa data dari kondisi ekonomi, politik, social budaya serta masalah masalah yang mungkin ditimbulkan (Riyaldi,2004)

Dalam menunjang pembangunan suatu daerah, maka visi misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlu keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimana masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang merupakan musyawara perencanaan

pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan desa yang yang tertuang dalam peraturan perundang undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Khususnya didesa numponi pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan yaitu pembangunan jalan pengerasan, croswe atau deker, irigasi dan pembangunan gapura batas desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam peraturan desa numponi tahun 2022. Daerah pedesaan di pedalaman masih sangat jauh dalam hal pembangunan, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan dan teknologi, 4 kelembagaan dan budaya. Pemerintah pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya untuk pembangunan jalan dalam peningkatan dan pemeliharaan ke dalam anggaran departemen pekerjaan umum. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan jalan pengerasan.

Dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”. Upaya mendorong kesamaan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu menegakkan program pemerataan pembangunan berskala

nasional yang menyeluruh ke semua wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional ditunjang oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa terkait dengan pembangunan jalan, karena perkembangan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia. Jika kita bicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan. Diberbagai pelosok tanah air masih diperoleh berbagai daerah pedesaan yang sangat jengah keadaannya dibandingkan dengan kota yang lengkap dengan sumber dayanya, salah satunya desa Numponi.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga menjalankan peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, hal ini mengingat gerak dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi. Oleh, karena itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi pembangunan selanjutnya. Sesuai arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan yaitu membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memakai potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat

diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang mandiri dalam keberagaman penduduk dan kegiatannya.

Jadi, tidak akan salah jika pemerintah memacu perhatian publik terhadap infrastruktur Afandi & Warjio, (2015).Salah satu bentuk infrastruktur dalam menunjang 6 pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur jalan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Warsilah dan Ahmad (2015), menjelaskan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan Peraturan Desa Numponi No.2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022, maka ada beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan jalan
2. Pembangunan gapura batas desa
3. Croswe atau deker
4. Irigasi

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka merupakan program dari pemerintah desa yang dibuat dengan panjang 500 meter. Pembangunan jalan usaha tani tersebut dibuat oleh pemerintah desa untuk semua masyarakat desa numponi sarana

transportasi bagi para petani untuk mempermudah masyarakat dalam usaha pertanian.

Tabel 1.1
Jenis Jenis pembangunan didesa numpoi

No	Jenis pembangunan	Volume pekerjaan	Besarnya Dana	Sumber dana	Keterangan
1	Pembangunan jalan pengerasan	500 x 4 x 0,20 meter	Rp.130.928.500	DD	Belum selesai
2	Croswe atau deker	2 x 3 meter	Rp.50.000.000	DD	Tuntas
3	Irigasi	100 meter	Rp.35.000.000	DD	Tuntas
4	Pembangunan Gapura batas desa	2 unit	Rp.50.000.000	DD	Belum terealisasi

Sumber: pemerintah des numponi tahun 2022

Berdasarkan data di atas penulis melihat adanya pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik, itu dapat di lihat dari kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat memperhatikan mengingat bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa numponi adalah bertani. Sehingga salah satu pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah akses jalan usaha tani yang menghubungkan tempat kediaman para petani ke sumber lahan pertanian. Namun penulis melihat implementasi pembangunan infrastruktur jalan usahatani tidak terealisasi dengan baik. Halini tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, masyarakat merasa sangat resah tanpa adanya infrastruktur akses jalan yang ideal. Selain itu, tahapan pedoman pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemantauan dan pengawasan masih kurang efektif.

Berdasarkan pembangunan infrastruktur berupa jalan di desa belum merata maka penulis melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini ke dalam sebuah judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA NUMPONI KECAMATAN MALAKA TIMUR KABUPATEN MALAKA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan Jalan di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Jalan di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang implementasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan jalan di Desa Numponi, Kabupaten Malaka.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bertambahnya sumbangan informasi dan pemikiran bagi Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur mengenai Pembangunan Jalan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah desa Numponi penelitian ini dapat memberikan sumbanganbagitercapainya tujuan pembangunan di daerah pedesaan yang partisipatif,melalui perencanaan dengan langkah-langkah kegiatan perencanaanyang baik dan mendasarkan pada kebutuhan atau aspirasi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat desa numponi Penelitian ini diharapkan dapat bertambahnya sumbangan informasi dan pemikiran bagi pemerintah Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur mengenai Pembangunan Jalan.
- c. Menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desadengan mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah guna memberdayakan masyarakat agar lebih maju
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa Numpni